

Pemimpin dan Feedback Rakyat di Indonesia Perspektif Al-Qur'an

Ayu Sugiarti¹, Muhammad Kudhori²

UIN Walisongo Semarang^{1,2}

2104026149@student.walisongo.ac.id¹, kudhori@walisongo.ac.id²

Leader and People Feedback in Indonesia Qur'anic Perspective

Abstract

Leadership in a state must have a shared role and responsibility between the ruler and the people in realizing peace in a nation. Even though the system used in Indonesia is democracy and the presidency, it must still maintain the sharia values contained in Islam. The purpose of preparing this paper is to find out the verses of the Koran relating to the relationship between leaders, the responsibility of leaders so that they have the value of justice, mutually beneficial responsibilities according to Islamic teachings. Likewise, the role of the community must take its position and provide feedback to the state. How to choose a leader who will be a determining figure in a country. The style used in writing papers is library or literature research using qualitative methods and referring to several journals, articles, books, books and websites that are related to the theme of discussion. With the primary source Al-Qur'an. So that we can find a conclusion about the relationship between the rulers and the people, namely giving them the responsibility to lead according to the verses of the Koran by maintaining human norms so that people must obey their leaders as long as they do not encourage evil.

Keyword: Leader; Society; Feedback; Al-Qur'an;

Abstrak

Kepimpinan dalam negara harus memiliki peran dan tanggung jawab bersama antara penguasa dan rakyat dalam mewujudkan kedamaian di suatu bangsa. Meskipun sistem yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi dan kepresidenan, harus tetap menyimpan nilai syariat yang ada dalam Islam. Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi antara pemimpin, tanggung jawab pemimpin supaya mempunyai nilai keadilan, tanggung jawab yang saling menguntungkan sesuai ajaran Islam. Begitu pula peran masyarakat yang harus menempatkan posisinya dan memberikan feedback terhadap negara. Bagaimana memilih pemimpin yang akan menjadi tokoh penentu dalam suatu negara. Corak yang digunakan dalam pembuatan makalah secara library research atau kepustakaan dengan metode kualitatif dan mengacu pada beberapa jurnal, artikel, buku, kitab maupun website yang saling berkaitan dengan tema pembahasan. Dengan sumber primer Al-Qur'an. Sehingga dapat menemukan kesimpulan relasi penguasa dan rakyat yakni memberikan tanggung jawab memimpin sesuai ayat Al-Qur'an dengan mempertahankan norma kemanusiaan begitu pula sebagai rakyat harus taat terhadap pimpinan selama tidak mengajak kemungkaran.

Keywords: Kepemimpinan; Rakyat; Feedback, Al-Qur'an.

Pendahuluan

Keberagaman Indonesia yang menampung berbagai suku bangsa, agama, budaya, adat dan bahasa menjadi nilai tersendiri. Bangsa yang heterogen masing-masing menyimpan kontribusi dalam kemerdekaan Indonesia hingga lahirnya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Nusantara, kini menampung penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan tetap mempertahankan moderasi dalam berbagai hal sehingga tidak membedakan satu sama lain. Tentunya dalam perjalanan menuju kemerdekaan banyak menyimpan kisah baik buruknya yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Setiap masa jabatan kepemimpinan tidak luput dari salah, meskipun kebaikan dan kebenaran selalu diutamakan. Sebagaimana masa Suharto yang begitu populer dengan masa orde baru. Disisi lain beliau pernah memberi kesejahteraan dan keamanan terhadap rakyatnya, akan tetapi, tindakan kepemimpinan yang dilakukan presiden ke-dua ini mempunyai nilai yang otoriter serta tindakan yang mampu menghilangkan nyawa seseorang, apabila terdapat masyarakat yang mengkritik masa kepengurusannya diluar jalur aturan-aturan yang telah ditentukan.

Misalnya kasus Rizal Ramli. Pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Beliau mengaku pada tahun 1978, ketika menjadi mahasiswa dipenjara dengan mahasiswa Timur Leste akibat menolak kebijakan orde baru yang dianggap berbelok dari cita-cita bernegara dan berbangsa dan ikut serta melakukan demonstrasi. Rizal Ramli juga menyampaikan tindakan keamanan untuk menangani demonstrasi mahasiswa lebih banyak menggunakan senjata.¹ Peristiwa lain pada masa orde baru banyak menyisakan misteri yang belum terselesaikan hingga sekarang, akibat ketidakadilan yang dilakukan penguasa kepada rakyat, yang memperjuangkan demokrasi. Salah satunya kasus penembakan misterius pada tahun 1981 sampai 1985 terhadap Bromocorah, Gali dan Residivis yang mengalami hukuman mati atau dikenal *penembakan misterius*. Kasus Tanjung Priok, terjadi pada tahun 1984-1987 perihal pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan kerusuhan besar serta menelan banyak korban.² Fenomena demikian masih terus ada di Indonesia, sekalipun misalnya, presiden tidak menghendaki demikian, tetap saja ada bawahan yang menyalahgunakan jabatannya sebagai kekuasaan tertinggi dan merasa paling benar.

Kasus-kasus demikian bahkan terjadi satu tahun silam diantaranya kekerasan aparat di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada 8 Februari 2022. Pihak kepolisian yang mengamankan beberapa warga yang tidak setuju atas lahan mereka yang nantinya akan dibuat penambangan Batu Andesit untuk Bendungan Bener. Mereka takut jika pembangunan tersebut merusak mata air. Akibatnya berujung rusuh dan sejumlah warga mendapat pukulan, tendangan, di tangkap dan ditahan dari pihak aparat.³ Kasus lain penyiksaan yang dilakukan oleh Polri-TNI. Menurut data Kompas terdapat 50 kasus kejam dan tidak manusiawi selama Juni 2021 hingga Mei 2022. Salah satunya meninggalnya tahanan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan bernama Freddy Nicolaus pada 13 Januari 2022.⁴ Sebenarnya masih banyak kasus

¹ Eko Purwanto, "Kritik Pemimpin Terhadap Penguasa Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Aktualisasinya Di Indonesia," 2018, 28.

² Kristian Erdianto, "Kontras Paparkan 10 Kasus Pelanggaran HAM Yang Diduga Melibatkan Soeharto," 2022, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/05/25/07220041/kontras-paparkan-10-kasus-pelanggaran-ham-yang-diduga-melibatkan-soeharto>.

³ News Indonesia, "Wadas – 'Gesekan' Antar Warga Desa, Kata Pemerintah Namun Pegiat Menyebut 'Pembungkaman' Atas Penolakan Masyarakat," News Indonesia, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60322206>.

⁴ Issha Harruma, "Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia 2022," Kompas, 2022, https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/22/01000001/kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia-2022#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=16939841864696&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.

lainnya seperti kasus mutilasi kepada 4 warga sipil Mimika, kasus penembakan Brigadir J oleh Freddy Sambo dan lainnya. Fenomena demikian menjadi penting dalam penanggulangan ketegasan pemimpin kepada bawahannya. Maupun kesadaran mereka sebagai pelindung seluruh rayat Indonesia di negara demokrasi ini. Peristiwa ketimpangan yang dilakukan pemimpin dan oknum tertentu dalam mengatasi kerusuhan masyarakat karena menginginkan keadilan menjadi cerminan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Meluruskan berbagai problematika yang dilancarkan oleh penguasa dengan merenggut keadilan rakyat perlu diberantas. Namun perlu memahami sistematika yang berlangsung di negaranya, misalnya di Indonesia. Tidak diperbolehkan menyerang balik pemimpin negara dengan cara yang biadab, apalagi hingga merenggut nyawa manusia yang tidak bersalah. Contoh kasus pemberontakan masyarakat yang menjadi sorotan bangsa bahkan dunia yakni bom terencana oleh kelompok teroris di Bali pada 12 Oktober 2002 yang dipimpin oleh Amrozi bin Nurhasyim beserta 26 orang lainnya termasuk Ali Imron, Umar Patek, Ali Fauzi dan Qomarudin secara terorganisir dan dipersiapkan secara matang. Beberapa titik pengeboman diantaranya di Trotoar dekat Kantor Konsulat Jendral Amerika Serikat Renon Denpasar Bali, Parkiran depan Diskotek Sari Club dan di dekat Diskotek Paddy's Pub. Banyak kerusakan yang dialami akibat pengeboman berencana tersebut seperti bangunan yang hancur, Kantor Panin Bank meledak dan rumah rumah rata dengan tanah. Ledakan bom terbesar sepanjang sejarah tersebut telah merenggut 202 orang dan 209 terluka. Diantara mereka merupakan Rakyat Indonesia bahkan wisatawan manca negara dari Amerika, Jerman, Swedia, Prancis, Denmark, Swiss dan masih banyak lagi.⁵

Kasus kelompok yang ingin menghancurkan pemerintah dengan cara merugikan banyak pihak, dan mengesampingkan orang-orang yang tidak bersalah, meskipun oleh oknum tertentu masih terus bergulir. Misalnya, kasus baku tembak dan bom Thamrin. Dalangnya Aman Abdurrahman yang menjabat sebagai Ketua ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) di Indonesia dan Pendiri Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Aksi tersebut berlangsung di Gedung Sarinah Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016.⁶ Golongan lain yang menyerang pemerintahan secara sarkas lainnya adalah kelompok Separatis Teroris

⁵ Puspasari Setyaningrum, "Tragedi Bom Bali I: Kronologi, Jumlah Korban, Pelaku, Dan Penyelesaian," Kompas, 2022, <https://denpasar.kompas.com/read/2022/10/12/073615378/tragedi-bom-bali-i-kronologi-jumlah-korban-pelaku-dan-penyelesaian#page2>.

⁶ Issha Harruma, "7 Kasus Terorisme Terbesar Di Indonesia," Kompas, 2022, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/28/01300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia>.

Papua. Terjadi pada 2021 di Distrik Kenyam Kabupaten Nuha Papua. Kasus tersebut menyeret 8 korban hingga meninggal dunia dan 2 luka-luka⁷ Peristiwa tersebut menjadi kehati-hatian tersendiri bagi para pemimpin Indonesia agar lebih waspada dan ketat mengawasi ketertiban bangsa yang heterogen ini. Sekaligus cerminan lagi dalam mengatasi permasalahan sehingga tidak mudah terprovokasi bagi sekelompok orang yang ingin memerdekakan diri dengan menginjak orang lain apalagi menghilangkan nyawa yang menjadi hak asasi manusia. Lebih cerdas memilah cara yang ampuh dengan membaca situasi lingkungan bangsa agar tetap mempertahankan norma kemanusiaan dan kenegaraan yang tidak melenceng dari syariat Islam.

Melihat dari kaca mata sekarang, polemik masa lalu jauh berbeda dengan masa kini. Bentuk apapun sistem pemerintahan yang ada, harus menjunjung tinggi nilai solidaritas dan keamanan mayoritas rakyatnya. Karena pemimpin menjadi pelindung masyarakat dan menjadi wakil untuk penataan bangsa. Begitu pula sebaliknya, tanggung jawab rakyat terhadap pemimpin agar selaras karena ada norma ketersalingan diantara keduanya untuk menciptakan negara yang mengaplikasikan nilai-nilai syariah. Kemudian, bagaimana merespon kasus kasus terdahulu maupun peristiwa sekarang agar terciptanya bangsa yang sesuai dengan aturan-aturan Islam?. Maka perlu dipahami korelasi antara keduanya. Penyusunan artikel ini, akan membuka pandangan baru dalam melaksanakan tugas seorang pemimpin dan rakyat agar memiliki landasan kuat dengan merujuk pada firman Allah atau bertujuan supaya sesuai dengan ayat ayat Al Qur'an.

Beberapa artikel yang membahas ayat-ayat pemimpin telah ditulis oleh para akademisi dan peneliti. Akan tetapi sejauh menggali tulisan terkait pemimpin menurut Al-Qur'an, penulis belum menemukan artikel secara lengkap yang tidak hanya membahas tanggung jawab pemimpin namun juga menguraikan bagaimana rakyat memilih dan memberikan *feedback* terhadap pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam. Tentunya berdasarkan dengan ayat-ayat yang berkesinambungan. Beberapa artikel yang selaras dan sudah terbit di jurnal diantaranya berjudul "Pemimpin Ideal Perspektif Ayat Al-Qur'an" yang ditulis oleh Wely Dozan dan Qohar Al-Bashor. Didalamnya membahas tujuan Allah menciptakan manusia kemudian mengurai kata pemimpin dalam ayat-ayat tertentu. Selain itu menerangkan bagaimana seharusnya seorang pemimpin mampu menjalankan tanggung jawabnya

⁷ Republika Network, "Kronologi Kelompok Separatis Teroris Bantai Delapan Warga Di Papua," REPUBLIKA NETWORK, 2022, <https://digdaya.republika.co.id/posts/165481/kronologi-kelompok-separatis-teroris-bantai-delapan-warga-di-papua>.

terhadap jabatan yang diterima. Tentunya harus sejalur dengan ayat-ayat Al-Qur'an.⁸

Artikel selanjutnya yang ditulis oleh Mahyudin berjudul "Karakter dan Konsep Pemimpin dalam Perspektif Al-Qur'an". Isi dalam artikel, memuat bagaimana karakter yang seharusnya pemimpin miliki, tanpa bersebrangan dengan ayat Al-Qur'an. Menjabarkan kata pemimpin yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada beberapa ayat tertentu salah satunya Kholifah. Mencantumkan ayat-ayat kepemimpinan dan sosok pemimpin⁹ Artikel lainnya yang membahas pemimpin berjudul "Konsep Pemimpin dan Kriteria Memilih Pemimpin" yang ditulis oleh Cecep Anwar dan Acep Rahlan Maulana. Ia mengungkap pengertian pemimpin dengan nama yang berbeda dalam Al-Qur'an. Misalnya Kholifah, Ulul Amri, Imamah, Sulthon dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan bagaimana masyarakat dihimbau untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Al-Qur'an dari segi karakteristik.¹⁰

Lalu, ada artikel ditulis oleh Basuki Wibawa, Marno dan Inas Afifah Zahra yang bertajuk "Kewajiban Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58-59". Artikel tersebut menjelaskan tentang kewajiban seorang pemimpin serta kewajiban ummat. Bagaimana pemimpin yang mendapatkan amanat untuk menertibkan masyarakat agar keamanan tetap terjaga. Didalamnya juga menjabarkan hakikat kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh ummat yang sejalan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Basuki Wibawa juga mencantumkan penafsiran surat An-Nisa [4] : 58-59 menurut mufassir Musthofa Al-Marâghi dan Sayyid Quthb.¹¹ Kemudian penulisan mengaju pada skripsi yang berjudul "Konsep Masyarakat Ideal dalam Perspektif Al-Qur'an" oleh Abdul Ghofur. Berbeda pada artikel sebelumnya yang menjelaskan ideal pemimpin. Skripsi ini ditulis untuk memahami timbal balik masyarakat yang disebut ideal, tentunya tidak jauh dari syariat Islam. Abdul Ghofur mengupas beberapa ayat yang berhubungan

⁸ Wely Dozan and Qohar Al Basir, "Pemimpin Ideal Perspektif Al-Qur'an," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 55–65.

⁹ Sulaiman Ibrahim, Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasasyâf, *Al-Ulum*, Vol. 18 No. 2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.30603/au.v18i2.536> Mahyudin Mahyudin, "Karakter Dan Konsep Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 104–10.

¹⁰ Acep Rahlan Maulana and Cecep Anwar, "Konsep Pemimpin Dan Kriteria Memilih Pemimpin Dalam Alqur'an," *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2022): 58–66.

¹¹ Inas Afifah Zahra, Marno Marno, and Basuki Wibawa, "KEWAJIBAN PEMIMPIN DAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR; AN SURAH AN-NISA AYAT 58-59," *Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 1 (2022): 11–15.

dengan masyarakat ideal. Beliau juga melakukan penelitian komparatif dalam melihat sudut pandang masyarakat ideal yang dahulu dan masa kini.¹²

Melihat rujukan beberapa artikel diatas, bahwa belum ada artikel secara menyeluruh membahas terkait pemimpin yang ideal sekaligus *feedback* yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ada di Indonesia yang notabene negara heterogen. Maka penulis menyajikan informasi yang membahas bagaimana seharusnya seorang pemimpin melaksanakan tugasnya sesuai dengan syariat Islam. Rakyat sebagai penentu sosok pemimpin juga perlu menganalisa mana sekiranya sifat, karakteristik, dan jiwa kepemimpinan yang terdapat pada calon pemimpin sehingga tidak fatal dalam memilih. Dalam artikel ini nantinya juga akan dibahas apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat kepada pemimpinnya.

Penulisan artikel ini memakai penelitian kualitatif yang menggunakan library research atau disebut keputakaan. Beberapa yang dijadikan rujukan refrensi ialah artikel jurnal, skripsi, buku, kitab serta berbagai sumber yang masih relevan dan selaras dengan pembahasan. Adapun sumber utama dalam penulisan ini ialah Al-Qur'an. Sedangkan sumber sekunder berupa jurnal-jurnal, buku, kitab yang mempunyai kesinambungan dengan pembahasan tersebut.

Ayat tentang Anjuran Memilih Pemimpin

1. Pemimpin yang Mendatangkan Manfaat

Sebagai makhluk sosial kita perlu seorang pemimpin yang wajib dipatuhi sebagai hakim dalam memutuskan persoalan dengan cara adil. Posisi penguasa dalam kemasyarakatan sangatlah penting selain sebagai penentu persoalan, juga berperan dalam mengatur sistematisa sosial dan koordinasi masalah dunia dengan regulasi Islam. Al-Qur'an memaparkan ayat yang membahas terkait anjuran untuk memilih pemimpin yang baik sesuai agama Islam. Contohnya dalam Q.S Al-Imrân [3]: 28

يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (wali pemimpin, teman setia, pelindung) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari

¹² Abdul Gofur, “Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *IAIN Palopo*, 2016, 24–68.

mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah kamu kembali.” (QS: Al- Imrân [3]: 28)

Tidak ada batasan tertentu, misalnya hanya berlangsung oleh seseorang yang lemah, sakit atau apapun, namun boleh kapanpun, siapapun dan dimanapun. Sesuai dengan istilah atau kaidah yang ada dalam fiqih bahwa menolak kerusakan itu harus lebih didahulukan meskipun ada sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan Dalam tafsir kemenag dijelaskan bahwa dilarang menjadikan wali atau pemimpin dari golongan orang kafir dan dilarang berteman akrab dengan orang kafir. Para ulama salaf telah sepakat melarang memilih pemimpin dari golongan non muslim. Pada masa itu memang mayoritas adalah kaum muslimin dan jelas ulama melarang hal tersebut, namun dalam hal muamalah ulama lebih longgar dalam membatasi hubungan, karena yang dipentingkan adalah adanya manfaat dari hubungan muamalah tersebut. Boleh melakukan hubungan muamalah dengan pertimbangan jika kaum kafir melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau mudharat bagi kaum muslimin. Dengan demikian maka diperbolehkan. Orang mukmin diperbolehkan untuk berteman ataupun berhubungan secara akrab dengan kaum kafir dengan alasan saling membagi kemanfaatan dan menghindari kemungkinan yang keluar dari syariat Islam atau kemudharatan. Islam yang menjadi landasan suatu pemerintahan tidak melarang hal tersebut. Adapun negara yang bersandar dengan keislaman boleh bekerjasama dengan negara yang notabennya tidak Islam. Tujuannya tentu saling mutualisme dan menghindari kemudharatan.

Dalam hal ini, jumbuh ulama diperbolehkan melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran asalkan untuk menghilangkan sesuatu yang tidak diinginkan dari musuh baik bencana, menjaga keselamatan jiwa, menjaga fisik dari kejahatan, benda dan sebagainya. Praktik demikian pernah dialami oleh sahabat Nabi Muhammad bernama Ammar bin Yasir. Ia dipaksa oleh kaum Quraisy supaya menjadi kafir. Tetapi dirinya memilih beriman dengan seyakini-yakinnya dalam hati, meskipun lisannya mengatakan kafir demi menjada jiwa dan keluarganya. Dengan demikian turunlah surat An-Nahl [17]: 106.

2. Menjalankan Tugasnya dengan Baik

Pada ayat lain juga dijelaskan tentang ajuran memilih pemimpin yaitu didalam Q.S An-Nisâ [4]: 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah

kami ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (QS: An-Nisâ [4]: 144.

Kaum muslimin diperingatkan agar berhati-hati dalam meminta pertolongan kepada orang kafir yang memusuhi Islam baik dengan niat, ide-ide maupun dengan perbuatan, karena pertolongan yang didapat dari orang-orang kafir itu mungkin akan membahayakan kaum muslimin sendiri. Allah menanyakan kepada orang-orang mukmin, apakah mereka akan membuat hal-hal yang menyebabkan mereka berhak menerima siksaan yaitu apabila mereka menggunakan orang kafir menjadi penolong mereka. pada ayat ini sebagian mufassir mengartikan dengan hubungan pertemanan karena wali disitu dimaknai sebagai teman ataupun penolong, bisa dimaknai sebagai pemimpin yang menolong. dikhawatirkan apabila kaum muslim memiliki teman yang kafir dan sebab sering ditolong bisa jadi orang kafir tersebut mengajak ke selain Allah SWT.

M. Quraish Shihab pada ayat ini berpendapat bahwa boleh memilih pemimpin dari golongan non-muslim asalkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan banyak manfaat. Yang tidak boleh adalah pemimpin kafir dalam negara khilafah karena jelas akan merusak sebuah struktur syariat. menurut beliau hubungan dengan non-muslim diperbolehkan asalkan tidak urusan agama dan Ibnu Taimiyah juga pernah berkata Allah swt mendukung pemerintahan yang adil sekalipun kafir dan tidak mendukung pemerintahan zhalim sekalipun muslim.¹³ M. Quraish Shihab memberi contoh zaman dahulu pada masa Umar bin Khattab pemerintahan yang dipimpinnya pernah ada seorang romawi menjabat sebagai kepala kantor. Dinasti Abbasiyah dan para penguasa setelahnya, pada masa itu, juga pernah menerapkan kasus jabatan yang diberikan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Keluarga mereka juga mempunyai hak menduduki kursi kekuasaan seperti perdana menteri.¹⁴

3. Adil dan Amanah

Prinsip lain yang harus diterapkan oleh pemegang kekuasaan agar sejalan dengan sistematika dan menjadi pemimpin yang layak adalah selalu Adil dan amanah sebagaimana dalam Q.s An-Nisâ [3]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

¹³ Imam Ibnu Taimiyah, *Majmu 'fatawa Li Ibn Taimiyah*, 1st ed. (Beirut: Darul Fikr, 1980), 63.

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 845.

“Sesungguhnya Allah Swt. menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Swt memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Swt. adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat 58 dari Q.S An-Nisâ dijelaskan mengenai prinsip yang harus ada pada diri seorang pemimpin yakni amanat terhadap semua yang berhak mendapatkannya. Apabila sudah dipercaya oleh rakyat dalam mengurus negara, wajib memberikan kepercayaan secara penuh dalam membangun bangsanya. Prinsip selanjutnya adalah menegakkan keadilan terhadap seluruh komponen masyarakat yang ada didalamnya. Hal ini berkaitan dengan amanat selain dari pada kewajibannya menerapkan perumusan landasan dasar negara dan aturan hukum secara adil.¹⁵ Tafsir Departemen Agama menjabarkan ayat diatas bahwa terdapat perintah untuk menyampaikan amanah sebagai bentuk pelaksana serta tanggung jawab secara penuh kepada yang berhak menerimanya. Wahbah Al-Zuhaili juga menyebutkan ayat tersebut berlaku bagi siapa saja supaya mengaplikasikan amanat yang harus diembannya baik secara individual maupun sosial. Disisi lain ayat tersebut menyimpan makna secara eksplisit bahwa melakukan amanah menjadi perintah meskipun tidak terdapat *fi'il Amr* secara kontekstual, akan tetapi menggunakan *fi'il mudhôri'* yang diikuti dengan *lam Amr*.¹⁶

4. Kekuatan intelektual dan spiritual

Poin tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qashôsh [28]: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُمَا إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Istilah Qowiyyul Amîn disini yang menjadi poin pembahasan. Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Adzîm karya Ibnu Katsir sebagai tafsir klasik menjelaskan bahwa Qowiyyul Amîn diartikan sebagai orang yang dapat dipercaya dan mempunyai kekuatan fisik. Hal tersebut disandarkan pada kisah seorang putri Nabi Syu'aib terkait Nabi Musa yang mampu sekaligus layak

¹⁵ A. Malik Madani, *Politik Berpayung Fiqih* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 6–11.

¹⁶ Muh Al Gazhali and Muh Al Gazhali, “AMANAHAH DALAM AL-QUR'AN (STUDI TENTANG PERSEPSI PENGURUS BEMIAIN PALOPO)” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

dipekerjakan.¹⁷ Berpeda pandangan dengan mufassir kontemporer dalam kitab Al-Mishbah karya Quraisy Shihab. Beliau menjelaskan makna Qowiyyul Amîn sebagai kemampuan seseorang di berbagai bidang yang tidak terpaku sekedar fisik belaka namun juga kekuatan intelektual dan spiritual yang bagus. Demikian seseorang mampu memilih integritas yang tinggi serta amanah. Hal ini akan menurunkan ego pemimpin dan merasa jika jabatan menjadi tanggung jawab terhadap dirinya terhadap manusia lain dan Tuhannya. Rasa demikian juga akan meminimalisir keluar dari haluan syariat Islam.¹⁸

Perbedaan penafsiran demikian bergantung pada situasi masa mufassir. Selain itu, pemaknaan Qowiyyul Amîn secara lebih luas berkaitan dengan ayat yang membahas kehidupan Nabi Musa sebelumnya, dijelaskan pada ayat 14 pada surat yang sama. Sifat tersebut memang tidak muncul begitu saja. Ada korelasi dengan ketetapan tuhan sebagai pencipta. Selanjutnya berhubungan dengan sifat putri Nabi Syu'aib dan dirinya, dimana mereka menjadi sosok muslim yang taat sehingga muncul persepsi bahwa firasat orang yang beriman adalah benar. Term Amîn juga berkesinambungan dengan makna memberi keamanan.¹⁹ Para ulama ahli tafsir kontemporer telah melakukan reinterpretasi pada kata Qowiyyul Amîn. Karena kata tersebut dinilai mempunyai makna yang berkembang seiring berjalannya zaman. Adapun arti Qowiyyul Amîn masa kini sebagai sebuah kemampuan menguasai skill yang orang lain mengetahuinya. Sehingga orang-orang dapat merekomendasikan. Inti poin utama dalam ayat Al-Qur'an sendiri ialah sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia agar selamat juga di akhirat kelak. Karena umat manusia terus mengalami perkembangan dan kemajuan setiap zaman maka perlu pedoman yang kuat sebagai pegangan hidup.

Kewajiban Pemimpin Terhadap Rakyatnya

Pemimpin dalam Islam juga dikenal dengan Ulil Amri. Motivasi yang paling kuat adanya ulil amri yakni mempertahankan agama Allah Ta'âlâ. Allah menciptakan bumi tidak hanya sekedar sebagai tempat hidup. Namun juga sebagai hamparan manusia untuk beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan kepada sesama ciptaan tuhan atau hubungan secara horizontal. Menolak kejahatan dan menyebarkan kebaikan. Allah Subhanahuwata'ala berfirman dalam surah al-Hajj [22] : 41

¹⁷ Bin Abdullah Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 267–68.

¹⁸ Muhammd Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah...* vol 9, 580.

¹⁹ Maulana, "Reinterpretasi Makna Qowiyyul Amiin Dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashosh Ayat 26," 2021, 12–13. Ibrahim, S. (2013). Hukum domestikasi dan kepemimpinan perempuan dalam keluarga. *Al-Ulum*, 13(2), 215-244.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah kembali segala urusan.”

Dalam buku Imam Abû al-Fidâ’ Ismail Ibn ‘Umar Ibn Kathîr al-Dimashqî (W: 774) mengungkapkan, para penguasa harus mampu mempunyai komitmen yang kuat, agar orang-orang yang ada dilingkungannya ikut mempunyai loyalitas kepada pemimpinnya. Artinya, seorang pemimpin harus bisa mengarahkan bawahannya ataupun yang dipimpin agar berada di jalan Allah Ta’âlâ. Pemimpin yang tercantum dalam Al-Quran tidak hanya memerintahkan sesuatu terhadap urusan duniawi, namun juga urusan akhirat yang mempunyai relasi dengan tuhan. Misalnya sholat, membayar zakat, puasa dan sebagainya. Ketika menjadi seorang pemimpin, artinya, sudah sanggup untuk mengerahkan tenaganya membimbing orang lain dengan sekuat tenaganya. Kesungguhan dan keniatan harus ada dalam lubuk hati terdalam dengan penuh rendah hati tanpa besar hati.

Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa aturan Islam sebenarnya begitu kompleks. Namun poin besar dari itu adalah untuk berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan. Beliau juga mengatakan tujuan dari Islam untuk memperbaiki agama umat Islam. Pemimpin yang Islam kategorikan tidak lekang untuk mendekati kepada Allah. Supaya apa yang diperintahkan tetap sesuai syariat sekaligus tidak melulu tentang dunia, apalagi hingga melupakan tuhan. Selain itu, menurut beliau, ketika sosok pemimpin tidak menyertakan nilai-nilai agama atau lepas dari syariat, akan mendapatkan kemalangan dalam kepemimpinannya. Kemudian apa yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Agama Islam tentunya, sebagai penyempurna tindakan yang berhubungan dengan duniawi. Karena akan sulit menyelesaikan perkara dunia tanpa mengikutsertakan tuhan.

Perkataan Syekh Ibn Taimiyah tersebut memberikan 2 poin besar yang harus dimiliki seorang pemimpin, yakni:

- Memelihara Agama Islam

Sebagai pemimpin atau ulil amri mempunyai tujuan mendasar dan begitu penting yaitu mempertahankan Agama Islam. Menjadikan Agama Islam sebagai citra sejati, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya mempunyai nilai Islam. Caranya dengan menghidupkan ajaran atau kesunnahan Nabi Muhammad dan menghilangkan bid’ah. Segala sesuatu yang tidak dilakukan

oleh Nabi Muhammad bukan berarti tidak boleh dikerjakan. Hanya saja selagi tidak ada dalih yang mengharamkannya sekaligus merupakan kebaikan maka laksanakanlah. Mengutamakan kemaslahatan bersama. Mempertahankan agama menjadi alasan untuk tetap menjaga keyakinan sang pemimpin sebagai panutan, agar ajaran Islam meresap dalam jiwanya, lalu pengikutnya bisa lebih mudah menerima dengan murni, tanpa kejahatan yang terselubung. Sebab keniatan dalam memimpin selalu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memelihara Agama Islam bisa dicapai dengan menyebarkan ajaran agama Islam, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, menjaga keutuhan masyarakat dari pertikaian dan mengawasi serta memperkuat wilayah umat Islam.

Implementasi menjaga Agama Islam di Indonesia, sebenarnya sudah tercapai. Kita bisa melihat ideologi Indonesia sebagai negara heterogen adalah Pancasila. Pembentukan Pancasila tidak hanya lahir dari founding father namun juga tokoh nasionalis lainnya dan peran ulama Nusantara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pegangan dasar bermasyarakat sudah final, tidak bisa diganggu gugat. Sebab Pancasila merangkum butir pluralitas. Hal ini juga pernah ditulis oleh salah satu Tim Peneliti Aswaja NU Center Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNNU) Jawa Timur, Ustadz Muhammad Syamsudin dengan judul “Nilai-nilai Islam dalam Pancasila”. Beliau juga menyampaikan jika Pancasila sudah selaras dan butir Pancasila sudah senafas dengan syariat Islam. Sila pertama, sebagai sumber utama dalam landasan teologis Bangsa Indonesia sekaligus menjadi poin dasar yang mengisi sila selanjutnya. Pancasila mampu menjadi tempat yang menaungi segala kebhinekaan Indonesia, mulai dari ethnics, golongan hingga suku yang berada di Indonesia.

- Memerintah dunia dengan aturan Islam

Pokok pembahasan selanjutnya terkait seorang pemimpin atau ulil amri ialah mengatur dunia dengan aturan Islam. Tidak ada kekuasaan secara langsung kecuali atas bantuan Allah. Setiap muslim perlu memahami standar Islam dengan baik agar apa yang dilakukan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Substansi agama Islam sendiri tercantum dalam kalimat tauhid, lâ ilâha illallah. Tidak ada kepercayaan diri tanpa menyertakan tuhan dalam dirinya. Ulil Amri hanyalah sebuah badan pimpinan yang kapabilitas utamanya adalah mengerjakan hukum yang telah ditentukan oleh Allah, atas apa yang menjadi tanggung jawab dan menyelaraskan kehidupan manusia dengan syariat Islam. Manusia tidak akan pernah menjadi sosok hebat tanpa adanya campur tangan Allah, melalui hukum-hukum yang telah ditetapkan. Agama yang Nabi Muhammad sampaikan telah mengajarkan dan mengatur segala

kebutuhan manusia sekaligus mengintegrasikan hubungan dengan berbagai negara bahkan dunia yang sangat luar biasa. Maka pengaturan yang ada harus dibuat sebaik mungkin. Baik dari segi sistem politik, kemanusiaan, ekonomi, sosial harus merujuk pada syariat Allah. Sebagaimana dalam Qur'an surat Yûsuf [12] : 50, tertulis:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Allah lah yang mempunyai keputusan. Allah juga memerintahkan kepada manusia agar menyembah hanya kepada-Nya. Demikian menjadi agama yang sesuai dengan perintah Allah. Akan tetapi banyak diantara manusia yang tidak menyadari itu. Berbagai tujuan Ulil Amri merupakan bagian dari tujuan yang berkelanjutan. Misalnya mempertahankan kesetaraan, melawan penindasan, menghindari perpecahan, menjaga keamanan dan memahami setiap individu. Pemimpin juga menjadi perintis yang sangat penting dalam berperan di sosial masyarakat. Pemimpin juga sebagai pelopor yang mempunyai peran penting. Keputusannya begitu mempengaruhi dalam berjalannya peraturan yang sudah disahkan.

Betapa pentingnya tugas pemimpin. Ia berkewajiban menjaga agama dan koordinasi masalah dunia dengan regulasi Islam. Sebagai motivasi di balik mengutus para nabi secara eksklusif untuk memimpin individu untuk selalu mematuhi dan tunduk kepada Allah. Ketika Nabi tidak diutus secara umum, selesailah dengan wafatnya nabi Muhammad, kemudian, pada saat itu, tugas nabi dan rasul berpindah ke perintis Muslim. Jelas pengaturan pemimpin adalah untuk mencapai tujuan prakarsa. Tujuan otoritas ini harus dicapai melalui penyempurnaan komitmennya. Melalui menyelesaikan komitmennya, maka, pada saat itu, seorang pemimpin harus dipatuhi dan dilindungi oleh setiap orang. Selanjutnya inisiatif bukanlah tujuan, ini hanyalah perantara dalam menyempurnakan penyerahan diri kepada Allah. Ketika pemimpin tidak dapat memahami tujuannya, inisiatif harus dihilangkan. Komitmen mendasarnya adalah untuk mencapai tujuan administrasi, khususnya memelihara agama Islam dan mengatur usaha umat Islam dengan syariat islam. Imam al-Mâwardî (W. 450 H) dalam kitabnya al-Aḥkâm al-Sultâniyyah telah

menyusun sepuluh komitmen ulil amri yang menggabungkan perspektif agama, masalah legislatif, keamanan lokal dan asing, organisasi, ekonomi dan ekuitas.

Demikian hasil kewajiban pemimpin adalah sebagai berikut;

1. Menjaga dan memelihara agama Islam sesuai standar agama yang jelas dan sesuai dengan ijma'ulama. Lebih berhati-hati dengan istilah bid'ah atau orang yang salah informasi. Selama melakukan sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat, maka boleh saja dan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu pemimpin juga mempunyai tanggung jawab mengkonsistensikan hukuman yang sudah berlaku dan disepakati agar agama terjaga dari segala penyimpangan dan umat yang sadar dari sikap bermuka dua.
2. Pertahankan hukum terhadap segala perkara. Mengimplementasikan secara merata tanpa pandang bulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sekaligus menguatkan hukuman dengan tajam ke bawah dan ke atas agar keadilan terasa oleh semua orang. Tujuan lainnya agar hukum tidak disalahgunakan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan orang yang tertindas tidak merasa lemah.
3. Mengizinkan peraturan hudud untuk menjaga keingkaran terhadap Allah dari ikhtiar untuk menyalahgunakannya, dan menjaga kebebasan pekerjaanya dari upaya pelanggaran dan pemusnahan terhadapnya. Di Indonesia, pelanggaran atau tindakan yang bernilai had dan hukuman sudah tercantum dalam undang-undang, sehingga bisa ditangani atau dihukum sesuai dengan kesepakatan yang sudah tertulis dalam undang-undang.
4. Menjaga daerah garis pertahanan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang sangat mengesankan sehingga musuh tidak bisa melihatnya sebagai celah melompat untuk mencemarkan nama baik kaum muslimin, atau menumpahkan darah umat Islam, atau individu yang menemukan rasa puas dengan muslim (mujâhid). Pemimpin di Indonesia yang masyarakatnya plural dari segi agama, suku maupun golongan, sama-sama saling menjaga. Untuk daerah pertahanan untuk menjaga keamanan sudah ditugaskan kepada polisi hingga TNI. Demikian tugas pemimpin untuk meyakinkan atas kesatuan dan ketertiban di wilayah manapun.
5. Pilih dan beri nama individu mahir yang akan dipegang situasi vital untuk menyelesaikan tugas negara dan pilih orang-orang tulen untuk mengawasi keuangan negara, dengan tujuan agar tugas-tugas negara

diselesaikan oleh orang-orang yang ahli dan keuangan dipegang oleh individu yang sah.

Berhubungan langsung dengan mengurus masalah-masalah yang sangat penting di negara, dan menyelidiki apa yang terjadi untuk mengetahui setiap keadaan individu, agar dia bisa menjaga agama dan menjaga individu.

Relasi Pemimpin dengan Rakyat

Penjabaran mengenai relasi Pemimpin dengan rakyat harus ada keterkaitan terhadap keduanya, setelah dijelaskan tanggung jawab pemimpin, perlu kaharusan yang dilakukan rakyat terhadap pemimpin negaranya. Menghormati pemimpin bagian dari relasi yang harus ditaati, sebagaimana Al-Qur'an juga mengisyaratkan hal demikian.

1. Taat Kepada Pemimpin

Ketaatan rakyat terhadap pemimpin menjadi hubungan ketersalingan dengan pemimpin. Komitmen dalam mengikuti aturan yang telah ditentukan pemimpin menjadi bagian dari iman, sebagaimana dalam Q.S An-Nisâ [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِ ءِآخِرِ ءَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam tafsir Al-Mishbâh, Ulil Amri ialah pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menjalankan urusan negara, selama tidak keluar dari syariat Islam. Jika terdapat perbedaan pendapat dikembalikan kepada Al Qur'an dan Sunnah. Menurut penjelasan beliau, kata Ulil Amri tidak diikuti taat karena memang mereka tidak mempunyai hak untuk ditaati jika melenceng dari hukum-hukum Islam. Adapun jika selaras dengan perintah Allah dan Rasul, wajib ditaati meskipun tidak selaras dengan yang diperintah. Taat yang dimaksud menurut Prof. Quraish Shihab ialah tunduk, menemani serta menerima aturan secara tulus. Selain itu, ayat ini bagian keharusan lembaga yang dipercaya untuk dapat menangani berbagai problematika masyarakat

seperti legislatif, yudikatif dan eksekutif.²⁰ Ketaatan masyarakat tidak berlaku apabila pemimpin menggiring rakyatnya kepada kemaksiatan. Akan tetapi wajib taat jika menunjukkan jalan kebenaran sesuai landasan syariat Islam meskipun penguasa tidak selaras dengan hati rakyat. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» رواه البخاري

“Wajib untuk mendengar dan mentaati (pemimpinnya) atas seorang muslim, baik suka maupun terpaksa. Kecuali bila dia diperintah untuk kemaksiatan. Jika dia diperintah untuk kemaksiatan, tidak ada kewajiban baginya untuk tunduk dan patuh kepada pemimpinnya.” HR.Bukahri.²¹

Realita kehidupan, kita sering menjumpai orang-orang yang bertolak belakang dengan pemimpin karena latarbelakang kehidupannya atau identitas partainya saat mengusungkan diri menjadi calon pemimpin tertentu di jajaran pemerintahan yang menjadi rival. Maka tetap wajib menaati aturan yang dibuatnya selama masuk pada kaidah syariat Islam dan tidak mengajak kepada kemungkaran, meskipun tidak menyukai orangnya akibat masa lalu yang pernah terjadi. Bahkan hal tersebut dapat terjadi dalam diri kita. Demikian hadits diatas menjadi salah satu pedoman untuk mentaati pemimpin meskipun dalam keadaan terpaksa selama tidak menjerumuskan pada kemungkaran.

2. Rakyat Berkontribusi Membela Negara

Hidup ditatanan bernegara, kewajiban menjaga keamanan sangatlah penting. Sebagaimana dalam Q.S Al-Imrân [3]: 97

..... وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا.....

“....Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia....”

Secara tersirat, ayat diatas mempunyai kandungan makna anjuran bagi setiap rakyat untuk benar-benar menciptakan keamanan dalam negaranya. Meskipun pada dasarnya memiliki makna berita tetapi juga bisa dipahami kalimat perintah. Landasan ini menjadi kewajiban masyarakat membela bangsanya. Sebagaimana diimplementasikan oleh Rasulullah Saw dalam

²⁰ Ibrahim, S. (2013). Hukum domestikasi dan kepemimpinan perempuan dalam keluarga. *Al-Ulum*, 13(2), 215-244. M.Quraish Shihab, , *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 844-46.

²¹ Nindhya Ayomi Delahara, “Batasan Taat Pada Pemimpin”, Jama'ah Darul Islam Gontor, 2020, <https://pps.unida.gontor.ac.id/batasan-taat-pada-pemimpin/>.

menginisiasi piagam Madinah yang berisi berbagai prinsip dalam pertahanan suatu negara.²²

Pasal yang terdapat dalam piagam Madinah mengenai pertahanan Madinah diantaranya pasal 37, berisi keterkaitan hak dan kewajiban seluruh rakyat Madinah baik kaum yahudi maupun Islam untuk menjaga keamanan negara. Piagam tersebut berbunyi “Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.”²³

Pasal di atas mencerminkan suatu isyarat bahwa menjaga kedaulatan serta keamanan merupakan kewajiban setiap warga dalam wilayahnya agar terhindar dari berbagai ancaman baik dari internal maupun eksternal. Kebersamaan melindungi bangsa bukanlah satu beban yang harus dipikul satu orang, kelompok akan tetapi tanggung jawab bersama yang hidup di negara tersebut. Maka wajib bagi semua pihak ikutserta dalam menginterpretasikan kemaslahatan bersama.

3. Berperan dalam Pelaksanaan Kebajikan

Hidup didalam suatu bangsa apalagi Indonesia yang mempunyai undang-undang dasar untuk menertibkan aturan-aturan kenegaraan, pastinya dibentuk untuk mengatur keberlangsungan kehidupan yang disiplin, membangun, dan saling menjaga ketertiban apalagi bangsa yang pluralis dalam berbagai hal. Maka melaksanakan kebaikan dalam mengimplementasikan undang-undang wajib bagi semua dan saling mengingatkan dalam hal Kebajikan. Unsur tersebut sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah [5] : 2

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .
“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Dalam kitab *Al-Jami' Li Ahkâm Al-Qur'an* (6/57) pendapat Al-Mawardi yang dinukil oleh Imam al-Qurtubi bahwa ayat tersebut mengisyaratkan seseorang yang bertakwa akan memperoleh ridho Allah, sedangkan melakukan kebajikan akan mendapat timbal balik dari manusia karena kebaikan itu sendiri. Menurut Ibnu Khuwayz Mandad yang dinukil oleh imam Al-Qurtubi

²² Asrori Mukhtarom, “Relasi Pemimpin Dengan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Rausyan Fikr* 14 (2018): 93.

²³ Ibnu Ishaq, *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2016), 301–4.

bahwa ada beberapa cara dalam merepresentasikan tolong menolong diantaranya orang yang paham agama mengajarkan ilmu kepada orang lain, Membantu fakir miskin bagi yang kaya harta, orang yang berjuang dijalan Allah, muslim yang saling membantu sesamanya, orang yang menghindari permusuhan, konflik serta pertengkaran sehingga memecah belah ummat.²⁴ Konsep landasan dasar di Indonesia sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip Al-Qur'an salah satunya mengenai kepemimpinan. Misalnya Penguasa yang harus bertakwa kepada Tuhan. Tampak jelas bahwa tujuannya adalah menjalankan tugas dengan perintah tuhan supaya membawa rakyatnya pada kesejahteraan dan kedamaian dengan masing-masing-masing akidah yang diimani sebagaimana tertera di UUD 1945 pasal 29 ayat 1. Selain itu, presiden sebagai pemimpin negara juga harus mengucapkan janji menjalankan kewajiban dengan keadilan yang menyeluruh dan menginterpretasikan aturan undang-undang sebagai baktinya terhadap nusa dan bangsa sebagaimana pada pasal 9 ayat 1.²⁵

Cerminan Penguasa Otoriter dan Kelompok Pemberontak

Problematika yang terjadi masa orde baru dimana Soeharto memimpin dengan membangun infrastruktur yang luas namun beriringan dengan pemerintahan yang otoriter, mencekik ekonomi bangsa dan memanfaatkan jabatannya dengan menelantarkan masyarakat serta maraknya korupsi, apalagi menghilangkan nyawa rakyatnya yang menginginkan kedamaian bangsa, patut dilengserkan sebab melanggar undang-undang bahkan mematikan hak asasi manusia. Sehingga beliau harus mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipimpin olehnya selama 32 tahun pada 1998 akibat demonstrasi yang sangat masif. Praktik kepemimpinan presiden ke-2 di Indonesia tersebut sebagai sampel penyalahgunaan kekuasaan meskipun dalam beberapa hal telah memberi kemakmuran kepada rakyatnya. Demikian karena penyelewengan yang dilakukan diluar jalur landasan dasar dan syariat, masyarakat tidak harus mematuhi. Bentuk demonstrasi yang dilakukan pada 21 Mei 1998 oleh seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa menjadi contoh ketidaktaatan yang perlu dilakukan apabila penguasa melakukan hal non normal apalagi merenggut hak asasi dan hak yang wajib didapatkan bawahan terhadap atasan.

Kasus lain yang menjadi perhatian masyarakat dalam melanggar perintah pemimpin yang sesuai dengan syariat akan tetapi memberontak tanpa

²⁴ Afrizal El Adzim Syahputra, "Surah Al-Maidah Ayat 2: Perintah Berbuat Adil Dan Saling Tolong Menolong," Unida Gontor, 2020, <https://tafsiralquran.id/surah-al-maidah-ayat-2-perintah-berbuat-adil-dan-saling-tolong-menolong/>.

²⁵ Aris Darmawan dkk, "Al-Qur'an Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Harmonisasi Konsep Kepemimpinan)," *Al-'Adl* 13 (2020): 191–92.

mendalami alasan mendasar demi mempertahankan ideologi suatu kelompok ialah kasus bom terencana di Bali yang dipimpin oleh Amrozi Bin Nurhasyim. Sekelompok teroris dengan pemahaman radikal yang menyalahkan sistem kepresidenan dan mengharapkan terciptanya negara islami yang dipahami oleh mereka. Ketika terjadi penyimpangan mereka enggan mengikuti dan bertindak senonohnya dengan kekerasan meskipun menghilangkan nyawa orang. Akan tetapi pengeboman yang dilakukan merenggung jiwa orang yang tidak bersalah dengan dalih jihad adalah kesalahan besar. Bom terbesar sepanjang sejarah yang dilakukan oleh Umar Patek selaku salah satu pelaku yang berkontribusi dalam pengeboman di Bali menyadari akan kesalahannya. Ia berperan dalam meracik bom seberat 50 kg. Setelah dipidana 20 tahun penjara, Umar Patek menyatakan penyesalan terhadap apa yang dilakukan. Ia menyampaikan sekecil apapun perannya dalam kasus pengeboman pada tahun 2002 tetap menjadi pelanggaran di mata hukum dan mendapatkan dosa besar dihadapan Allah SWT. Pesan tersebut disampaikan ketika ia diundang di acara Kick Andy dan diunggah di akun YouTube Metro Tv.²⁶

Cerminan rakyat yang memberontak dan melanggar norma kemanusiaan bahkan hukum negara mempunyai dampak besar sebagaimana contoh diatas. Maka peran keduanya sangat penting baik pemegang kekuasaan maupun masyarakat dalam mengimplementasikan nilai syariah yang di aplikasikan sebagai bentuk muammalah dalam menjalani kehidupan berbangsa dan negara untuk menciptakan keamanan bagi penghuni di suatu wilayah. Tidak memberikan ketimpangan tanggung jawab dengan melempar kewajiban satu sama lain akan tetapi bersama sama memikul dan menjunjung tinggi kewajiban masing-masing agar terwujudnya negara yang damai.

Kesimpulan

Seseorang yang sudah memperoleh jabatan dalam bidang pemerintahan ataupun jabatan dimana jabatan tersebut memberikan tanggung jawab atas suatu wilayah, maka hendaknya harus mempunyai rasa tanggung jawab penuh terhadap apa yang mereka pimpin. Dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan bagaimana spesifikasi seorang pemimpin yang seharusnya dipilih. Maka penentuan pemimpin yang akan menjadi tokoh penentu dalam mengambil keputusan, masyarakat perlu memahami karakteristik pemimpin yang dipilih agar tidak keliru. Tidak cukup calon pemimpin baik dalam segi intelektual namun harus diimbangi dengan spiritual yang kuat. Kemudian masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam mengimplementasikan peraturan yang

²⁶ Metro TV, “Peran Umar Patek Meracik Bom Di Peristiwa Bom Bali” (Jakarta, 2023), <https://youtu.be/ImY1gvpiWGY> .

telah disepakati dan harus patuh terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh penguasa dengan syarat perintah atau larangan tersebut tidak melanggar syariat yang berlaku, ketika apa yang ditetapkan penguasa bertentangan dengan syariat, maka masyarakat juga tidak ada kewajiban untuk menjalankan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh penguasa. Ketika pemimpin dan rakyat mampu berjalan dengan berdampingan akan tercipta negara humanis meskipun hidup dengan keanekaragaman yang Tuhan ciptakan sebagai suatu kelebihan. Keamanan negara terjaga tanpa adanya penindasan.

Daftar Pustaka

- Ayomi Delahara, Nindhya. “Batasan Taat Pada Pemimpin.” *Jama’ah Darul Islam Gontor*, 2020. <https://pps.unida.gontor.ac.id/batasan-taat-pada-pemimpin/>.
- Darmawan dkk, Aris. “Al-Qur’an Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Harmonisasi Konsep Kepemimpinan.” *Al-’Adl* 13 (2020).
- Dozan, Wely, and Qohar Al Basir. “Pemimpin Ideal Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 4, no. 1 (2021): 54–66.
- Erdianto, Kristian. “Kontras Paparkan 10 Kasus Pelanggaran HAM Yang Diduga Melibatkan Soeharto,” 2022. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/05/25/07220041/kontras-paparkan-10-kasus-pelanggaran-ham-yang-diduga-melibatkan-soeharto>.
- Gazhali, Muh Al, and Muh Al Gazhali. “AMANAHAH DALAM AL-QUR’AN (STUDI TENTANG PERSEPSI PENGURUS BEMIAIN PALOPO.” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Gofur, Abdul. “Konsep Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *IAIN Palopo*, 2016.
- Harruma, Issha. “7 Kasus Terorisme Terbesar Di Indonesia.” *Kompas*, 2022. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/28/01300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia>.
- . “Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia 2022.” *Kompas*, 2022. https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/22/01000001/kasus-pelanggaran-ham-di-indonesia-2022#amp_tf=Dari

%251%24s&aoh=16939841864696&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.

- Ibrahim, S. (2013). Hukum domestikasi dan kepemimpinan perempuan dalam keluarga. *Al-Ulum*, 13(2), 215-244.
- Imam Ibnu Taimiyah. *Majmu 'fatawa Li Ibn Taimiyah*. 1st ed. Beirut: Darul Fikr, 1980.
- Indonesia, News. "Wadas – 'Gesekan' Antar Warga Desa, Kata Pemerintah Namun Pegiat Menyebut 'Pembungkaman' Atas Penolakan Masyarakat." News Indonesia, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60322206>.
- Ishaq, Ibnu. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2016.
- Madani, A. Malik. *Politik Berpayung Fiqih*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mahyudin, Mahyudin. "Karakter Dan Konsep Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 102–12.
- Maulana. "Reinterpretasi Makna Qowiyyul Amiin Dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashosh Ayat 26," 2021.
- Maulana, Acep Rahlan, and Cecep Anwar. "Konsep Pemimpin Dan Kriteria Memilih Pemimpin Dalam Alqur'an." *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2022): 47–68.
- Metro TV. ""Peran Umar Patek Meracik Bom Di Peristiwa Bom Bali." Jakarta, 2023. <https://youtu.be/ImY1gvpiWGY> .
- Muhammad, Bin abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Mukhtarom, Asrori. "Relasi Pemimpin Dengan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Rausyan Fikr* 14 (2018).
- Network, Republika. "Kronologi Kelompok Separatis Teroris Bantai Delapan Warga Di Papua." REPUBLIKA NETWORK, 2022. <https://digdaya.republika.co.id/posts/165481/kronologi-kelompok-separatis-teroris-bantai-delapan-warga-di-papua>.
- Purwanto, Eko. "Kritik Pemimpin Terhadap Penguasa Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Aktualisasinya Di Indonesia," 2018, 28.

Setyaningrum, Puspasari. “Tragedi Bom Bali I: Kronologi, Jumlah Korban, Pelaku, Dan Penyelesaian.” Kompas, 2022. <https://denpasar.kompas.com/read/2022/10/12/073615378/tragedi-bom-bali-i-kronologi-jumlah-korban-pelaku-dan-penyelesaian#page2>.

Shihab, Quraish. , *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sulaiman Ibrahim, Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir Al-Kasasyâf, *Al-Ulum*, Vol. 18 No. 2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.30603/au.v18i2.536>

Syahputra, Afrizal El Adzim. “Surah Al-Maidah Ayat 2: Perintah Berbuat Adil Dan Saling Tolong Menolong.” Unida Gontor, 2020. <https://tafsiralquran.id/surah-al-maidah-ayat-2-perintah-berbuat-adil-dan-saling-tolong-menolong/>.

Zahra, Inas Afifah, Marno Marno, and Basuki Wibawa. “KEWAJIBAN PEMIMPIN DAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR; AN SURAH AN-NISA AYAT 58-59.” *Journal of Islamic Education Studies* 1, no. 1 (2022): 10–16.

Copyright (c) 2024 Ayu Sugiarti, Muhammad Kudhori



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).